

KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH DAERAH SE-SUMATERA UTARA DALAM SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Empat Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin Kota Medan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:





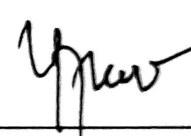




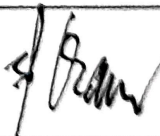
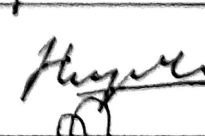

- | | |
|---|---|
| 1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 19. Pemerintah Kota Padang Sidempuan |
| 2. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | 20. Pemerintah Kabupaten Asahan |
| 3. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 21. Pemerintah Kabupaten Dairi |
| 4. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara | 22. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang |
| 5. Pemerintah Kabupaten Nias Barat | 23. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan |
| 6. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan | 24. Pemerintah Kabupaten Karo |
| 7. Pemerintah Kabupaten Nias Utara | 25. Pemerintah Kabupaten Langkat |
| 8. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat | 26. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal |
| 9. Pemerintah Kabupaten Samosir | 27. Pemerintah Kabupaten Nias |
| 10. Pemerintah Kabupaten Simalungun | 28. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas |
| 11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara | 29. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 12. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir | 30. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai |
| 13. Pemerintah Kota Binjai | 31. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan |
| 14. Pemerintah Kota Gunungsitoli | 32. Pemerintah Kota Medan |
| 15. Pemerintah Kota Pematangsiantar | 33. Pemerintah Kota Sibolga |
| 16. Pemerintah Kota Tanjungbalai | 34. Pemerintah Kota Tebing Tinggi |
| 17. Pemerintah Kabupaten Batubara | |
| 18. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah | |


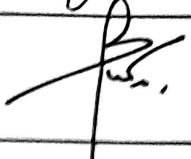


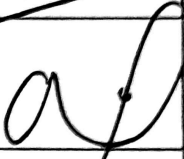







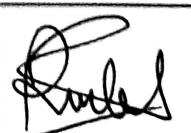
Secara bersama-sama bersepakat dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di Sumatera Utara, untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

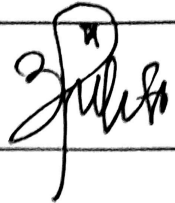


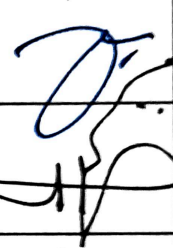

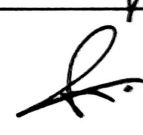
1. Bersepakat untuk tidak mengoperasikan aplikasi sejenis bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan mengoptimalkan pengelolaan SP4N-LAPOR!
2. Membuat Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dan menyusun rencana aksi pengelolaan pengaduan pada level instansi sebagai turunan dari Roadmap SP4N 2020-2024
3. Proaktif dalam peningkatan pengelolaan SP4N-LAPOR! melalui pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pendampingan secara berjenjang dengan melibatkan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! yang terdiri dari Admin Instansi dan Pejabat penghubung dalam mengelola pengaduan.
5. Berkomitmen memberikan tindak lanjut yang berkualitas terhadap seluruh laporan yang diterima dan memanfaatkan data pengaduan melalui SP4N-LAPOR!
6. Meningkatkan partisipasi publik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
7. Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan melalui anggaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pengaduan masing-masing.

8. Hasil dari tindakan lanjut kesepakatan bersama ini, akan dilakukan money scan secara berkala oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara dan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli 2022.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Medan sesuai dengan perwakilan instansi yang terlampir.

No	Instansi	Nama Perwakilan	Jabatan	Tanda Tangan
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Inspekturat	Irban phuan	
2	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	Inspekturat Muharrir Rihong	Inspektur	
3	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Inspektur Gambiro n	Inspektur	
4	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	NORA PARIA	Inspektur	
5	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	Yasafah waruwa	P.G. Inspektur	
6	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	Akhmad yusuf	Wakil Ketua	
7	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	YULIANS WAT	INSPEKTUR	
8	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	Daniel Sembiring	Auditor	
9	Pemerintah Kabupaten Samosir	Blasman Sitanggang	Sekretaris	
10	Pemerintah Kabupaten Simalungun	Roganda	inspektur	
11	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Fitro Haryuly	Pemangku	
12	Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	Peluan Pasaribu	Inspektur ul 1	

13	Pemerintah Kota Binjai	Solman Siragor	Kominfo	
14	Pemerintah Kota Gunungsitoli	Berkat Hulu	Irban IV Inspektur GA	
15	Pemerintah Kota Pematangsiantar	H. Oesman	PLT Inspektur	
16	Pemerintah Kota Tanjungbalai	SUSANTO	Inspektur	
17	Pemerintah Kabupaten Batubara	HASRUL INPAN	SEKRETARIS INSPEKTORAT	
18	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	Ibrahim Bahar	Sekretaris Inspektur	
19	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	Islahudin	Kadis Kominfo	
20	Pemerintah Kabupaten Asahan	Abd Rahman	Irban V	
21	Pemerintah Kabupaten Dairi	ELON S. SIASIKU	PLT INSPEK TUR	
22	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	SYAIFUL	KABAG ORGANISAS	
23	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	LUKMIHIL PARARIRU	AUDITOR MADYA	
24	Pemerintah Kabupaten Karo	F. Leonardo SURBARTI	PLT. KADIS KOMINFO	
25	Pemerintah Kabupaten Langkat			
26	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	RAHMAD DAULAY	SEKRETARIS INSPEKTORAT	

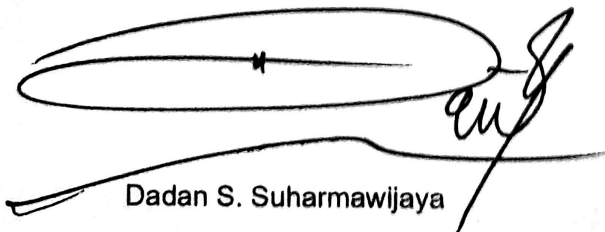
27	Pemerintah Kabupaten Nias			
28	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	NURHAFITAH	KABAG ONGA NISAS	
29	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara			
30	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	DIMAS KURNIAWATI	WISPEKTA	
31	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	M. Huzman Dk	Dirut Kambu	
32	Pemerintah Kota Medan	DES MARITO	Despetan	
33	Pemerintah Kota Sibolga	Albi Lubis	Ka. Umum	
34	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Kusnan	Kepala Kopo	

Mengetahui,

an. Asisten Deputi Transformasi Digital
Pelayanan Publik Kementerian PANRB


Rosikin

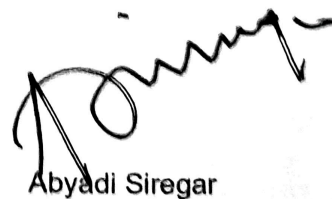
an. Ketua Ombudsman RI


Dadan S. Suharmawijaya

an. Kepala Pusat Penerangan
Kementerian Dalam Negeri


Rega Tadeak Hakim

Kepala Ombudsman Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara


Abyadi Siregar